KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023

-

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, kepada para pejabat dan aparat Pemerintah Daerah perlu diberikan sarana dan prasarana kerja.

Sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah, sehingga sarana dan prasarana yang berupa aset baik itu aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak perlu dikaji terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap eksistensi dan berpotensi merusak aset itu sendiri. Pada akhirnya, kurangnya perhatian dan pemeliharaan terhadap aset-aset tersebut akan berdampak pada kerugian Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Surakarta perlu memberikan jaminan keamanan terhadap kepemilikan aset-asetnya dari kemungkinan rusak maupun hilang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta sebagai Pejabat Pembantu Penatausahaan Barang Milik Daerah tetap melanjutkan mengasuransikan aset-aset yang berada di bawah penguasaannya, khususnya aset kendaraan operasional dinas.

II. PERMASALAHAN

Beberapa kemungkinan resiko yang pada umumnya dapat terjadi terhadap aset khususnya Kendaraan Dinas dan inventarisasinya antara lain :

- 1). Jaminan resiko yang terjadi akibat tabrakan;
- 2). Jaminan resiko yang terjadi akibat benturan;
- 3). Jaminan resiko yang terjadi akibat tergelincir;
- 4). Jaminan resiko yang terjadi akibat perbuatan jahat/orang tidak dikenal;
- 5). Jaminan resiko yang terjadi akibat pencurian, termasuk pencurian yang didahului/disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
- 6). Jaminan resiko yang terjadi akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat menyimpan kendaraan bermotor;
- 7). Jaminan resiko yang terjadi akibat kebakaran dikarenakan sambaran petir;
- 8). Jaminan resiko yang terjadi akibat kerusakan karena air atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
- 9). Jaminan resiko yang terjadi akibat dimusnahkan seluruh atau sebagian kendaraan atas perintah yang berwenang dalam upaya mencegah menjalarnya kebakaran;

Apabila kemungkinan-kemungkinan di atas benar-benar terjadi, maka pihak asuransi dituntut untuk menanggung semua kerusakan yang terjadi sebatas pada resiko yang ditawarkan.

III. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 54).

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan mengasuransikan asset milik Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi segala resiko yang akan mengakibatkan kerugian Daerah;
2. Melindungi aset-aset tersebut dari kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh Pemerintah Daerah;
3. Melakukan pengamanan dan memberikan perlindungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
4. Mendapat jaminan kerugian/kerusakan dari resiko yang dijaminakan meliputi bangunan gedung dan barang-barang inventaris (harta benda) yang dipertanggungkan;
5. Terlaksananya manfaat inventarisasi secara efektif dan efisien;

V. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Obyek yang diasuransikan yaitu : Kendaraan Dinas operasional roda 4 (empat) sebanyak 45 unit yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

VI. MANFAAT

Manfaat dari Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah ini diharapkan bisa menjamin keamanan bagi aset Pemerintah Daerah Kota Surakarta khususnya kendaraan dan terjaminnya pengamanan Barang Daerah dari faktor pencurian, kerusakan akibat kecelakaan maupun kebakaran serta memberikan ketenangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

VII. METODOLOGI

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus menyusun metodologi yang sesuai, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Aset yang akan diasuransikan benar-benar ada di dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah Kota Surakarta;
- b. Dasar Penilaian Satuan Harga Kendaraan menggunakan Harga Satuan Barang yg tercantum dalam daftar inventaris, faktor fisik, Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Belanja Asuransi Barang Milik Daerah- Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah selama periode 12 Bulan.

IX. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengelolaan barang Milik Daerah dengan Pagu Anggaran : Rp. 400.000.000,-

X. PERSYARATAN PELAKSANA PEKERJAAN

Pelaksana pekerjaan Jaminan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surakarta harus perusahaan asuransi yang memenuhi syarat administratif & teknis sebagaimana diatur dalam Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. Sanggup melaksanakan pekerjaan penutupan Asuransi Aset Pemerintah Kota Surakarta
- b. Sanggup dan tunduk pada pekerjaan/ketentuan yang berlaku dalam penutupan Asuransi di Indonesia
- c. Perusahaan Asuransi tidak dalam keadaan pailit dan tidak sedang terlibat masalah hukum

XI. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Dalam Penilaian Aset pada Pekerjaan Asuransi Kendaraan Dinas dapat ditunjuk Tenaga Ahli berpengalaman pada bidangnya dan berijazah Sarjana (S1).

XII. TAHAPAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan administrasi
2. koordinasi dengan pihak-pihak terkait
3. Pengumpulan data inventaris kendaraan yang akan diasuransikan
4. Pelaksanaan Pengadaan

XIII. HASIL PEKERJAAN

Polis Premi Asuransi Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Surakarta.

XIV. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan pedoman standar bagi pelaksana pekerjaan. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat segera menyusun jadwal pelaksanaan dan menetapkan metode Pemilihan sesuai ketentuan, sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik.

Surakarta, 21 Agustus 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat
Pembuat Komitmen

BUDI MURTONO, SE, M.Si
NIP. 19711010 199803 1 010